

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan publik dan infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pemerintah terus mengusahakan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat Indonesia baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pembangunan pedesaan pun turut mengalami peningkatan yang signifikan sejak adanya digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Mukhsin, 2020). Bahkan, pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Govindaraju et al., 2016).

Dalam pelaksanaan digitalisasi ini, pemerintah kota menerapkan konsep Smart City yang akan membantu meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah perkotaan. Konsep ini juga mendukung era Society 5.0 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mengatakan bahwa pada era ini data akan menjadi penghubung dalam meningkatkan pertumbuhan masa depan (Roby, 2019). Smart City diimplementasikan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat perkotaan yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan terutama dalam memperoleh informasi. Untuk mendukung konsep Smart City, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat program ‘Gerakan Menuju 100 Smart City’ pada tahun 2017 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staff Kepresidenan.



Gambar I. 1 100 Kota yang Menerapkan Smart City  
 Sumber: (Mahesa et al, 2019)

Gambar I.1 menjelaskan tentang 100 Kota di Indonesia yang sedang dikembangkan menggunakan konsep Smart City menuju kota cerdas berkelanjutan (Mahesa et al., 2019). Penekanan pembangunan kota dengan konsep Smart City dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu pemerintahannya (smart governance), ekonomi (smart economy dan smart branding), lingkungan (smart environment, smart living, smart mobility), dan masyarakatnya (smart people, smart society).

Salah satu kota yang telah berhasil menerapkan konsep Smart City yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, Kota Yogyakarta dan Sleman menjadi pilot project Smart City bersama dengan Kota Semarang, Serang, Tangerang, Depok, Bekasi, Sidoarjo, Kudus, dan Surakarta (Faidat & Khozin, 2018). Sebelum menerapkan konsep Smart City, Yogyakarta juga telah lebih dulu menerapkan konsep cyber, yang disebut Yogyakarta Cyber Province (Rachmawati, 2018).

Dalam mendukung konsep Smart City ini, pemerintah mulai mengupayakan layanan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang nantinya akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Pengembangan e-government ini ditujukan untuk efisiensi pengelolaan data dan informasi oleh pemerintah. Adanya e-government menjadi strategi unggulan dalam peningkatan mutu layanan dan mampu menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pada pemerintahan daerah, perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kawasan pedesaan tidak dapat menerapkan konsep Smart City

secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibuat konsep khusus bagi pedesaan yang disebut dengan Smart Village. Sama dengan Smart City, konsep Smart Village juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan integrasi informasi di lingkup pemerintahan yang lebih kecil, yaitu tingkat desa. Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa cerdas jika desa tersebut menggunakan teknologi informasi secara inovatif dalam mencapai efisiensi dan daya saing aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup (Herdiana, 2019). Tidak hanya menerapkan TIK, konsep Smart Village juga akan mampu meningkatkan kualitas dan potensi desa, peningkatan dalam aspek ekonomi, dan membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, masyarakat bukan hanya sebagai penyelenggara, namun juga sebagai penerima kebijakan pemerintah desa yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu desa yang perlu meninjau kembali penyelenggaraan pemerintahannya adalah Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Pagerharjo merupakan salah satu desa dengan luas wilayah 1.069,5115 Ha dan memiliki visi yaitu “Membangun Pagerharjo dalam kebersamaan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dengan sistem pelayanan yang baik untuk mewujudkan masyarakat Pagerharjo yang aman, nyaman, dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa” dan misi Desa Pagerharjo, yaitu (1) Peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia, (2) Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan desa melalui evaluasi organisasi, (3) Menggali potensi sumber daya alam di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain, (4) Pemerataan dan peningkatan pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.

Tabel I- 1 Nilai Goals SDGs di Desa Pagerharjo

No	Goals SDGs	Score
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	00.00
<b>2.</b>	<b>Desa Tanpa Kelaparan</b>	<b>32.91</b>
<b>3.</b>	<b>Desa Sehat dan Sejahtera</b>	<b>48.68</b>
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	34.15
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	65.28
6.	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	79.22
7.	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99.35

No	Goals SDGs	Score
8.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	27.19
9.	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	34.48
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	69.60
11.	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	35.13
12.	Konsumsi Produksi Desa Sadar Lingkungan	24.19
13.	Desa Tanggap Perubahan Iklim	00.00
14.	Desa Peduli Lingkungan Laut	00.00
15.	Desa Peduli Lingkungan Darat	30.65
16.	Desa Damai Berkeadilan	88.68
17.	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	00.00
18.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	18.72

Pada Tabel I-1 tentang Nilai Sustainable Development Goals (SDGs) pada Goals 2 (Desa Tanpa Kelaparan) dan Goals 3 (Desa Sehat dan Sejahtera) di Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki score SDGs yang belum mencapai 100%. Goals 2 (Desa Tanpa Kelaparan) baru mencapai angka 32.91, sedangkan pada Goals 3 (Desa Sehat dan Sejahtera) mencapai angka 48.68. Ditinjau dari besarnya nilai tersebut, perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai score SDGs yang maksimal pada Desa Pagerharjo (Transmigrasi, 2022).

Dalam rangka mewujudkan desa maju dan mandiri, terdapat indikator lain yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) melalui aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Berdasarkan data IDM, Desa Pagerharjo sendiri telah mendapatkan status Desa Mandiri dengan score 0,8373, nilai tersebut telah melampaui target desa itu sendiri yaitu 0,8156. Sebagai Desa yang telah mendapatkan status Desa Mandiri berdasarkan score IDM, kenaikan nilai SDGs Desa Pagerharjo pada Goals 2 (Desa Tanpa Kelaparan) dan Goals 3 (Desa Sehat Sejahtera) akan turut membantu mempertahankan nilai serta kualitas Desa Pagerharjo khususnya pada layanan kesehatan masyarakat desa.

Menurut Sachs (2015) dalam (Kurniawan & Atmojo, 2020) kesehatan menjadi hal yang fundamental dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan masyarakat yang sehat, maka derajat kesejahteraan

masyarakatnya pun akan turut meningkat. Sehingga, kesehatan menjadi salah satu pondasi yang turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan aspek lain yang menunjang kehidupan. Namun, berdasarkan data WHO pada tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan kasus stunting tertinggi se-Asia Tenggara yaitu sebesar 36,4%. Sedangkan Berdasarkan data pada Profile Kesehatan DIY Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo menyumbangkan 12,69% kasus stunting . Selain itu, menurut data pada Dinas Kesehatan Kulon Progo tahun 2020 Desa Pagerharjo menjadi kasus kejadian stunting tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Samigaluh II dengan persentase 20,24% atau sebanyak 56 anak penderita stunting (Pratiwi, 2021).

Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang diukur berdasarkan panjang atau tinggi badan kurang dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak menurut WHO (Pratiwi, 2021). Data di atas mendukung alasan mengapa score SDGs 2 dan3 di Desa Pagerharjo, Samigaluh masih rendah dan perlu dilakukan peningkatan guna mendukung visi Desa Pagerharjo yaitu “Membangun Pagerharjo dalam kebersamaan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dengan sistem pelayanan yang baik untuk mewujudkan masyarakat Pagerharjo yang aman, nyaman, dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”. Selain itu, SDGs juga memasukkan isu kematian ibu dalam tujuan ketiga yang ditargetkan sebesar 70 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Wulandari & Zoraya, 2020).

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan pendekatan menggunakan Enterprise Architecture yang merupakan blueprint untuk melakukan transformasi dengan penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memungkinkan suatu organisasi untuk mengimplementasikan perencanaan secara rinci dalam upaya mencapai visi dan misinya. Melalui perancangan blueprint Enterprise Architecture pada konsep Smart Village untuk mencapai tujuan Pemerintah Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta dalam memaksimalkan persentase score SDGs sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

### **I.1 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana rancangan Blueprint Enterprise Architecture menggunakan TOGAF pada konsep Smart Village dimensi Health Services di Desa Pagerharjo,

Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta?

- b. Bagaimana rancangan IT roadmap pedoman strategis implementasi untuk mewujudkan konsep Smart Village pada dimensi Health Services?

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan memodelkan rancangan Blueprint Enterprise Architecture pada konsep Smart Village dimensi Health Services di Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta.
- b. Menyusun dan menghasilkan rancangan IT roadmap pedoman strategis implementasi untuk mewujudkan pengembangan konsep Smart Village pada dimensi Health Services.

## **I.3 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

1. Perancangan Blueprint Enterprise Architecture pada konsep Smart Village dimensi Health Services akan dilakukan di Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta untuk memaksimalkan score Goals 2 (Desa Tanpa Kelaparan) dan Goals 3 (Desa Sehat Sejahtera) SDGs Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta.
2. Perancangan Blueprint Enterprise Architecture Smart Village pada dimensi Health Services akan menggunakan framework TOGAF yang terdiri dari 8 fase, yaitu Preliminary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information Architecture, Technology Architecture, Opportunities and Solution, dan Migration Planning.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Membantu Pemerintah Desa Pagerharjo dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan Blueprint Enterprise Architecture untuk mencapai target score SDGs Desa Pagerharjo melalui Indikator Desa Tanpa Kelaparan (Goals 2) dan Desa Sehat Sejahtera (Goals 3).
2. Membantu Pemerintah Desa Pagerharjo dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan Blueprint Enterprise Architecture untuk mempertahankan nilai Indikator Kesehatan pada Indeks Ketahanan Sosial sebagai bagian dari Indeks Desa Membangun (IDM).
3. Membantu Pemerintah Desa Pegerharjo dalam menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan Blueprint Enterprise Architecture untuk mencapai target Smart Village khususnya pada dimensi Health Services.